

## Literasi Informasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang Mengenai Mitigasi Bencana Abrasi Kecamatan Cibuaya

**Zilki Tsani Abdillah**

Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran  
Email: zilki20001@mail.unpad.ac.id

**Edwin Rizal**

Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran  
Email: edwin.rizal@unpad.ac.id

**Andri Yanto**

Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran  
Email: andri.yanto@unpad.ac.id

Received: 06-06-2024

Revised: 18-06-2024

Accepted: 23-06-2024

DOI: 10.24036/ib.v5i2.484

### Abstract

**(Objectives)** The coastal area of Karawang Regency, in Cibuaya, has been experiencing abrasion since 2017, causing damage to 177 housing units with different levels of damage. To address this issue, the government needs to implement effective mitigation measures, including providing information. This research aims to understand the role of information literacy in reducing disaster risk in the area. This research is how the ability of BPBD Karawang employees to search, evaluate and create information related to abrasion disaster mitigation in Cibuaya kec. To find out the information literacy skills of BPBD Karawang employees in improving employee information literacy in finding relevant information sources according to employee needs, so that BPBD Karawang employees can provide information and knowledge for the community in the Cibuaya area. **(Method)** This research uses a qualitative method with a case study type. In this context, the data was used to understand and analyze how BPBD Karawang employees use and create information about abrasion disasters, and how they evaluate the information to ensure relevance and accuracy. **(Findings)** This research shows that BPBD Karawang employees have good information literacy skills in searching, evaluating and creating information related to abrasion disaster mitigation. However, there are still some obstacles in managing disaster data and disseminating information through the website. Therefore, it is necessary to improve access and human resources to manage information on the website and the Prevention and Preparedness field so that the dissemination of disaster information is more effective and comprehensive. **Keywords:** Information literacy, Abrasion disaster mitigation, BPBD Karawang, Disaster data management, Disaster information dissemination.

### Abstrak

(Tujuan) Kawasan pesisir Kabupaten Karawang, tepatnya di Cibuaya telah mengalami abrasi sejak tahun 2017 yang mengakibatkan kerusakan pada 177 unit rumah dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mitigasi yang efektif, termasuk penyediaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran literasi informasi dalam mengurangi risiko bencana di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pegawai

BPBD Karawang dalam mencari, mengevaluasi, dan membuat informasi terkait mitigasi bencana abrasi di kec. Cibuaya. Untuk mengetahui kemampuan literasi informasi pegawai BPBD Karawang dalam meningkatkan literasi informasi pegawai dalam mencari sumber informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pegawai, sehingga pegawai BPBD Karawang dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat di wilayah Cibuaya. (Metode) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Dalam konteks ini, data digunakan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pegawai BPBD Karawang menggunakan dan membuat informasi tentang bencana abrasi, serta bagaimana mereka mengevaluasi informasi tersebut untuk memastikan relevansi dan keakuratannya. (Temuan) Penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai BPBD Karawang memiliki kemampuan literasi informasi yang baik dalam mencari, mengevaluasi dan membuat informasi terkait mitigasi bencana abrasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan data bencana dan penyebaran informasi melalui website. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan akses dan sumber daya manusia untuk mengelola informasi pada website dan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar penyebaran informasi bencana lebih efektif dan menyeluruh.

**Kata Kunci:** Literasi informasi, Mitigasi bencana abrasi, BPBD Karawang, Pengelolaan data bencana, Penyebaran informasi bencana.

## PENDAHULUAN

Wilayah pesisir pantai utara di Kabupaten Karawang, khususnya Kecamatan Cibuaya, saat ini berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dua faktor utama yang menjadi penyebab kondisi ini adalah kerusakan lingkungan alam dan global warming yang mempengaruhi tingkat suhu rata-rata atmosfer, lautan dan bumi. Kedua faktor tersebut berdampak pada peningkatan intensitas gelombang pasang air laut abrasi. Beberapa desa yang mengalami dampak langsung dari fenomena ini antara lain Desa Pusaka Jaya Utara, Desa Cemara Jaya, Desa Pisangan, Desa Suka Jaya, dan Desa Sungai Buntu. Situasi ini

memerlukan penanganan yang serius dan terpadu untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada wilayah tersebut. Berdasarkan Hasil Kajian Risiko (InaRISK) memaparkan bahwa Cibuaya termasuk dalam salah satu wilayah yang mengalami gelombang pasang ekstrem dan abrasi dengan kategori sedang sampai tinggi.

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, bencana Abrasi di Cibuaya menyebabkan kerusakan pada 177-unit rumah dengan tingkat kerusakan yang berbeda. 75 rumah mengalami kerusakan berat, 54 mengalami kerusakan sedang, dan 48

mengalami kerusakan ringan. Selain itu, 138 penduduk terpaksa mengungsi ke tetangga dan kerabat dekat, serta 474 penduduk atau 173 kepala keluarga lainnya. Selain itu, abrasi mengubah panjang garis pantai, terutama di Desa Cemara Jaya dan Desa Sedari. Dari tahun 2006 hingga 2016, panjang garis pantai di Desa Cemara Jaya mencapai 134,94098 km<sup>2</sup> dan di Desa Sedari 132,62638 km<sup>2</sup> (Mahmudin, 2016).

Perlu adanya urgensi penanganan yang serius dan terpadu untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Mitigasi bencana adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Serangkaian tindakan yang sangat penting dilakukan untuk mengurangi dan mencegah dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan di suatu daerah yang dikenal sebagai mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi didefinisikan sebagai tahapan yang mencakup upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, peningkatan kesadaran, dan peningkatan kemampuan dalam

menghadapi ancaman bencana (Peraturan Pemerintah, 2007).

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 24 Bab IV Pasal 21 C Tahun 2007, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah menyusun, membina, dan memberikan informasi tentang peta rawan bencana. Penanggulangan Bencana dapat terjadi apabila informasi kebencanaan dalam hal ini berupa peta rawan bencana dapat tersedia dengan lengkap untuk beberapa wilayah bencana dan bisa dengan mudah diakses oleh setiap wilayah terdampak bencana (Peraturan Pemerintah, 2007). Untuk memenuhi tugas BPBD Karawang dalam menyusun, menetapkan, dan menciptakan informasi peta rawan bencana, pegawai harus memiliki kemampuan literasi informasi.

Kemampuan ini merupakan kompetensi penting bagi pegawai BPBD agar bisa membantu mereka membuat keputusan tentang cara mengatasi masalah bencana maupun merumuskan kebijakan. Oleh karena itu, pegawai BPBD Karawang perlu memahami kebutuhan informasi dalam

penanganan bencana dan wilayah yang terdampak bencana, mengevaluasi sumber informasi yang diterima, dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana. Menurut UNESCO, tujuan dari literasi informasi adalah untuk memberdayakan seseorang dalam segala aspek kehidupan, agar dapat mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif guna mencapai tujuan pribadi, sosial, pekerjaan, dan pendidikan (UNESCO, 2023).

Dalam masalah ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku lembaga penanganan bencana pemerintah perlu membuat konstruksi pengetahuan untuk masyarakat agar bisa mengatasi permasalahan bencana yang terjadi dengan menyediakan informasi penanganan dan pencegahan bencana yang berdasarkan riset sumber informasi yang relevan, dan kemudian dari informasi yang dikumpulkan ini bisa menjadi infografis, artikel, modul maupun pamflet.

Kemampuan literasi informasi pegawai BPBD masih perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu cara untuk menganalisis kemampuan literasi informasi bencana yang dilakukan oleh Pegawai BPBD Karawang adalah dengan mengobservasi kegiatan pegawai BPBD dalam mencari, memperoleh, dan mengevaluasi informasi bencana abrasi yang terjadi di wilayah Cibuaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mencari informasi bisa memberikan dampak pada peningkatan kemampuan literasi informasi pegawai BPBD Karawang.

Meninjau Latar belakang masalah diatas sebagai awal penelitian penulis menemukan beberapa indikasi masalah mengenai bagaimana kemampuan pegawai BPBD Karawang dalam mencari, mengevaluasi dan menciptakan informasi terkait mitigasi bencana abrasi kec.Cibuaya. Untuk mengetahui Kemampuan Literasi informasi pegawai BPBD Karawang dalam meningkatkan literasi informasi pegawai dalam mencari sumber informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pegawai, dengan begitu

pegawai BPBD Karawang bisa memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat di wilayah Cibuaya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko bencana abrasi di wilayah Cibuaya dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui budaya sadar bencana, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif ketika dihadapkan pada bencana abrasi, baik dalam pengambilan keputusan untuk penyelamatan diri pada saat keadaan darurat maupun dalam upaya mitigasi bencana. Pemahaman masyarakat terhadap penilaian risiko bencana merupakan komponen penting untuk menciptakan teknik tanggap bencana yang efektif (Olii Nazarina & Sekky Rizky, 2020).

Berkaitan dengan hal diatas, penelitian sebelumnya membahas mengenai literasi informasi bencana dengan judul "Peran Literasi Informasi Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat Jawa Barat" Penelitian ini mengamati literasi informasi dan kesiapsiagaan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, yang berisiko terhadap bencana alam

termasuk gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Empat komponen penting dari literasi informasi bencana telah diidentifikasi: mencari informasi, mengevaluasi informasi, mengatur dan mengintegrasikan informasi, serta menggunakan dan mentransfer pengetahuan secara etis dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak literasi informasi bencana terhadap kesiapsiagaan masyarakat di Jawa Barat, sebuah wilayah yang rentan terhadap bencana longsor, gempa bumi, dan tsunami. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi informasi bencana memainkan peran penting (45%) dalam kesiapsiagaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak literasi informasi bencana terhadap kesiapsiagaan masyarakat, terutama dalam hal identifikasi. Selain itu, penelitian ini menunjukkan rekomendasi untuk meningkatkan literasi informasi bencana, terutama mengenai media informasi bencana. Rekomendasi ini menyarankan adanya instruksi yang menyeluruh dan

penggunaan media untuk memberikan informasi terkait bencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Peningkatan literasi informasi bencana berpotensi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat (Marlyono, 2017).

Berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari kemampuan literasi informasi personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Karawang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, Bab IV, Pasal 21 C tahun 2007, yang menyebutkan bahwa BPBD berperan dalam menyusun, menetapkan, dan menyebarluaskan peta risiko bencana. Mengingat belum adanya publikasi penelitian yang terkait dengan kemampuan literasi informasi pegawai BPBD Kabupaten Karawang, penulis memilih untuk berfokus pada aspek ini dalam penelitiannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitiannya adalah pegawai di Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Karawang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk kemajuan pengetahuan di bidang pengolahan dan manajemen informasi, khususnya dalam kaitannya dengan literasi informasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya mengenai literasi informasi bencana. Dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan masyarakat yang menghadapi kesulitan serupa dengan wilayah Cibuaya. Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, dan bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman literasi informasi bagi personil di bidang mitigasi bencana BPBD Kabupaten Karawang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dan konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan multi sumber-sumber yang diperoleh bisa dimanfaatkan (Yin, 2014).

Data ini berhubungan dengan ide, persepsi, pikiran, pendapat, dan kepercayaan orang yang diteliti pada suatu topik (Moleong, 2016). Dalam konteks ini, data tersebut digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana pegawai BPBD Karawang menggunakan dan menciptakan informasi tentang bencana abrasi, serta bagaimana mereka mengevaluasi informasi tersebut untuk memastikan relevansi dan akurasi. Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami dan menganalisis kemampuan literasi informasi pegawai BPBD Karawang, dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang

Bencana adalah suatu atau serangkaian kejadian yang mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh aktivitas manusia, kekuatan alam atau buatan, dan dapat mengakibatkan kematian, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan efek psikologi (Peraturan Pemerintah, 2007). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didirikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 Pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan - baik sebelum dan sesudah bencana - merupakan bagian dari kegiatan penanggulangan bencana dan kedaruratan terpadu yang dilakukan oleh BPBD, sebuah lembaga pemerintah non-departemen (Nursyabani, Putera, & Kusdarini, 2020).



Gambar 1. Gedung BPBD Karawang  
(Dokumentasi Peneliti, 2024)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang memiliki VISI untuk menjadi “Karawang Yang Tanggap Dan Tangguh Dalam Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana”. Sedangkan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Karawang yaitu: 1.) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penanggulangan bencana yang kuat. 2.) Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Secara terencana, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan secara adil dan merata. 3.) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan risiko bencana. 4.) Meningkatkan dan mengembangkan SDM masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana (“Visi Misi BPBD Kabupaten Karawang,” 2024).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pedoman untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat yang telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka menurunkan risiko bencana. Empat tugas, yang masing-

masing diuraikan lebih lanjut menjadi tujuh kegiatan yang lebih kecil, membentuk implementasi dan pencapaian SPM Program Penanggulangan Bencana untuk tahun 2023:

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Kegiatan);
2. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
6. Penyusunan Rencana Kontjensi;
7. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (*Laporan Penerapan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang 2023, 2024*).

## B. HASIL & PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan perolehan data dan informasi oleh penulis melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Karawang, maka hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

## 1. Mencari Informasi

Kemampuan untuk mencari informasi merupakan kompetensi kunci yang diperlukan untuk menentukan strategi dan teknik yang paling efektif dalam proses pencarian informasi ketika informasi tersebut dibutuhkan. Terdapat beberapa kriteria penilaian yang harus dipertimbangkan dalam proses pencarian sumber informasi (Ali Lien, Wydia Gunawan, Agustin Angelina Aruan, Kusuma, & Adriyanto, 2020).

Literasi Informasi Pegawai BPBD Karawang dalam mencari informasi terkait mitigasi bencana Abrasi. Informasi yang mereka cari untuk memitigasi masyarakat dalam bencana abrasi dimulai dari pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Informasi yang dicari dimulai dengan mengakses Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG telah menyediakan grup WhatsApp yang berfungsi sebagai saluran komunikasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang. Grup ini digunakan untuk

menyampaikan informasi terkini terkait cuaca, gelombang pasang, dan siaran pers yang dikeluarkan oleh BMKG. Namun, informasi cuaca yang diakses dari BMKG selalu diperbarui secara real-time melalui grup WhatsApp. Dan Informasi BMKG maritim terkait gelombang pasang dan Press Releases diakses melalui website resmi BMKG. Selain BMKG, mereka juga memanfaatkan Geographic Information System (GIS) untuk mengakses data lapangan, termasuk kontur tanah yang dikelola oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Sumber daya lainnya juga berasal dari beberapa dinas terkait. Salah satunya ada dari BNPB dari buku saku (semacam artikel penanganan bencana) yang diterbitkan oleh BNPB melalui media library. Namun, pegawai BPBD lebih sering mencari informasi dari BMKG, terutama yang berkaitan dengan peringatan dini. Tetapi untuk menerima informasi terkini mengenai bencana di wilayah Karawang secara langsung melalui grup WhatsApp yang dikelola oleh tim tanggap bencana (SATGAS).

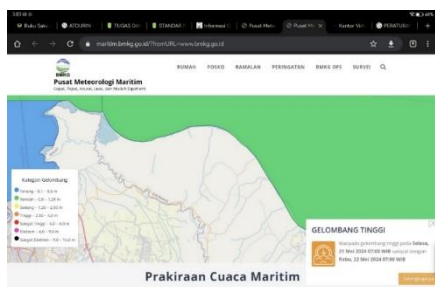
Berdasarkan hasil observasi, BPBD Karawang mencari informasi yang disebutkan oleh diatas yaitu:

Sumber pencegahan diambil dari sumber BMKG untuk menginformasikan terkait informasi cuaca terkini via GRUP WhatsApp



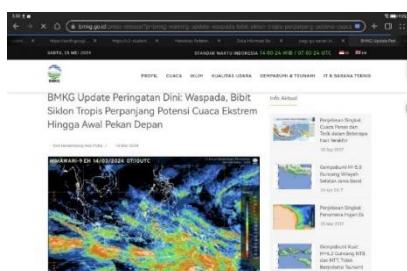
Gambar 2. Informasi Cuaca BMKG (Dokumentasi Peneliti, 2024)

Informasi BMKG maritim dengan alamat: Pusat Meteorologi Maritim | BMKG



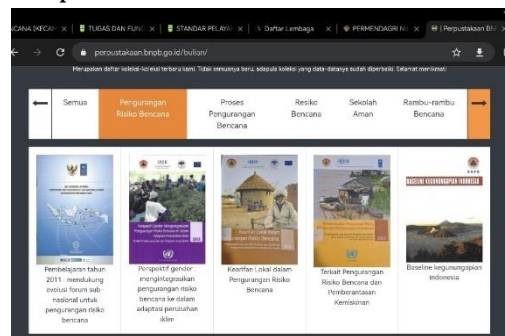
Gambar 3. Informasi Gelombang Tinggi (Pusat Meteorologi Maritim, 2024)

Press Releases BMKG



Gambar 4. Informasi Gelombang Tinggi (Pusat Meteorologi Maritim, 2024)

Buku Saku BNPB di website Perpustakaan BNPB



Gambar 5. Webiste Perpustakaan BNPB ("Perpustakaan BNPB," 2024)

Gambar 6. Buku Saku BNPB



(Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana, 2020)

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan triangulator dalam penelitian ini yaitu Bapak Ida Bagus Gede Widnyana Putra yang menyebutkan bahwa dalam mencari informasi harus menggunakan informasi

dari sumber terpercaya seperti dari Instansi/Lembaga yang memiliki tupoksi dalam pemberian informasi kebencanaan misalnya seperti BNPB, BMKG, PVMBG, BRIN dan jurnal/bulletin/buku yang diterbitkan oleh akademisi dan praktisi. Hal ini dilatar belakangi karena ketika pegawai menerima informasi harus dilakukan dengan hati-hati karena informasi yang diterima dan bagaimana informasi tersebut digunakan dapat memiliki berpengaruh pada penggunaan informasi tersebut.

Namun perlu diketahui meskipun BPBD Karawang sudah menentukan sumber informasi mana saja yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan dan salah satu sumber informasi yang sering dipakai untuk mitigasi dari BNPB berupa buku saku. Tetapi mereka tidak memiliki informasi potensi bencana di setiap daerah. Hal ini terjadi karena BPBD Kab.Karawang belum memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontingensi (RenKon). Meskipun mereka sudah menggunakan berbagai

sumber informasi yang relevan dengan kondisi bencana yang terjadi di setiap wilayah. Tetapi Dokumen Kajian Risiko Bencana masih dalam proses review oleh BNPB. Kajian risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah. Alasan mengapa BPBD perlu memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana karena dengan adanya Dokumen kajian risiko bencana yang ada di daerahnya ketika menjalani penanggulangan bencana di satu daerah dapat berfokus pada perlakuan parameter risiko bencana dengan dasar yang jelas dan terukur; dan bisa menyelaraskan arah kebijakan penyelenggara penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam kesatuan tujuan. penting digunakan sebagai paduan untuk mengkaji risiko setiap daerah (Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, 2012).

Terdapat perbedaan apabila suatu BPBD daerah sudah memiliki dokumen kajian risiko bencana dengan

daerah yang tidak memiliki dokumen kajian risiko bencana. Salah satu yang dapat terlihat selain dari informasi potensi di setiap daerah yaitu analisis potensi bencana di daerah itu belum bisa diketahui akibat jangka panjang yang akan dialami apa. Dalam kasus Kec.cibuaya karena tidak ada kajian resiko bencana pegawai BPBD tidak bisa mengetahui batas laut disekitar pantai termasuk tinggi, sedang atau rendah. Tidak tau dampak jangka panjang dari abrasi itu seperti apa. Apabila sudah ada Kajian Risiko Bencana (KRB) kemungkinan ketika melakukan mitigasi ke masyarakat pegawai BPBD karawang itu bukan lagi hanya membahas mengenai sosialisasi pencegahan dan penanganan saja. Melainkan masyarakat bisa lebih teredukasi mengenai peringatan dininya seperti apa.

Perbedaan penanganan bencana antara pantai selatan dan pantai utara sangatlah berbeda. Alasan mengapa penanganan mitigasi pantai selatan lebih memadai hal ini terjadi karena Pantai Selatan sudah memiliki Kajian Resiko Bencana, sehingga pegawai

BPBD sudah mengetahui potensi bahaya didaerah tersebut seperti apa. Pegawai BPBD Karawang merasa bahwa dalam mitigasi bencana karawang masih masif. Sehingga informasi yang mereka kelola dan terima hanya buku saku dari BNPB maupun sumber lainnya dari Sistem Informasi Geografis (GIS) maupun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Berdasarkan pada pernyataan triangulator yaitu Bapak Ida Bagus Gede Widnyana Putra menjelaskan bahwa apabila hanya sebatas informasi dari BMKG itu hanya sebatas peringatan dini yang memang bisa disampaikan secara berkala tergantung informasinya bisa harian bisa mingguan. Namun, informasi yang memang harus kita desiminasikan kembali ke masyarakat terkait risiko apa saja yang bisa terjadi di wilayah Karawang, agar masyarakat bisa melakukan upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi itu yang menjadi dasar BPBD melakukan kegiatan kalau seperti di Bali, ada 14 resiko bencana kemudian di Kajian Resiko Bencana (KRB) itu selama periode 5 tahunan kita juga menentukan prioritas bencana apa

yang akan kita tangani sesuai dengan tingkat risikonya. Prioritasnya adalah risiko bencana yang memiliki resiko tinggi karena di provinsi dampaknya masif dan lintas kabupaten kota jadi itu yang prioritas menjadi penanganan. Selain itu, KRB dan RPB adalah bahwa standar pelayanan minimal yang harusnya disediakan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait risiko bencana yang ada.

**2. Mengevaluasi Informasi**  
 Dalam langkah ini, seluruh informasi disesuaikan dengan menentukan bahwa sumber informasi yang tersedia memang sudah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pegawai. Evaluasi informasi yang harus dilakukan oleh narasumber, dengan memilih sumber referensi pencarian informasi akurat seperti jurnal, artikel, maupun situs web resmi khusus menyajikan informasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

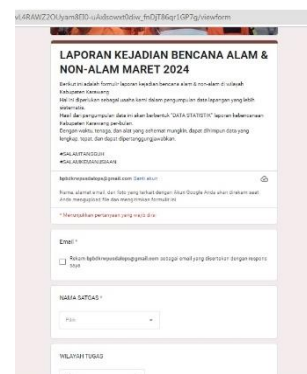
Pedoman WhatsApp sudah ada dari BNPB provinsi. Pegawai Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan hanya

mengikuti mengadaptasi dari penilaian laporan kedalam bentuk gform.



Gambar 7. Pedoman Formulir Data Kejadian dan Dampak Bencana untuk laporan Assessment (Pusdatinkom BNPB, 2024)

Satgas yang bertugas disetiap kecamatan akan melapor bencana yang terjadi diwilayah karawang dengan format laporan yang sudah disediakan. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Pelaksana Penyuluh Bencana BPBD Karawang, mengevaluasi sumber informasi.



Gambar 8. Gform Assesment Laporan Kejadian Bencana

Dokumentasi Peneliti, 2024  
Informasi dan data dari laporan kejadian bencana yang sudah terekap dalam laporan bencana bulanan dari gform outputnya menjadi excel.

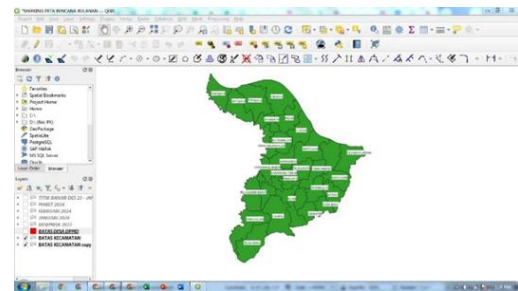
Gambar 9. Laporan Data Assesment Bulanan

Dokumentasi Peneliti, 2024  
BPBD Karawang baru dibentuk tahun 2015, dan ditahun itu rekapan laporan data bencana tidak terdata secara lengkap. Dan baru lengkap ditahun 2022 hingga tahun 2024. Admin BPBD belum bisa melapor secara konsisten terkait data kejadian bencana yang terjadi di wilayah karawang ke website DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia) terdata ditahun 2022. Ini terjadi karena masa pemerintahan saat itu ada mutasi-mutasi, perpindahan pejabat jadi tidak ada keberlanjutan untuk meneruskan laporan.



Gambar 10. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)

(Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI), 2024)  
Penyajian data bencana berbentuk infografis peta riwayat kejadian dengan menggunakan QGIS untuk marking peta wilayah terdampak yang disebarakan di



Instagram.

Gambar 11. Markig wilayah terdampak menggunakan QGIS

Dokumentasi Peneliti, 2024  
Sebagai dasar untuk mengeluarkan informasi peringatan dini yang diambil dari buku saku BNPB ataupun sumber lainnya seperti GIS, BMKG yang relevan sesuai dengan informasi yang kami butuhkan di desain di aplikasi CANVA ataupun photoshop.

### 3. Menciptakan Informasi

Informasi yang diciptakan selain dalam bentuk informasi fisik seperti peta riwayat kejadian bencana, BPBD Karawang juga mengadakan beberapa kegiatan yang tujuan untuk memberikan edukasi terhadap mitigasi bencana. Salah satunya ialah Sosialisasi Informasi berupa Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Jadi bentuknya kegiatannya itu bisa dalam bentuk pelatihan simulasi bencana, sosialisasi selain dari infografis.

Seperti pada tahun sebelumnya, terdapat laporan mengenai gelombang pasang tinggi yang meningkat selama acara minggon. Laporan ini perlu dipantau melalui data kejadian bencana untuk memahami perkembangannya. Data assessment selalu menjadi acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut, seperti membangun plank rawan bencana di beberapa titik dan mengadakan simulasi serta sosialisasi di desa-desa. Prioritas desa yang harus diperhatikan adalah desa mana saja. Dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana juga dapat dijadikan acuan.

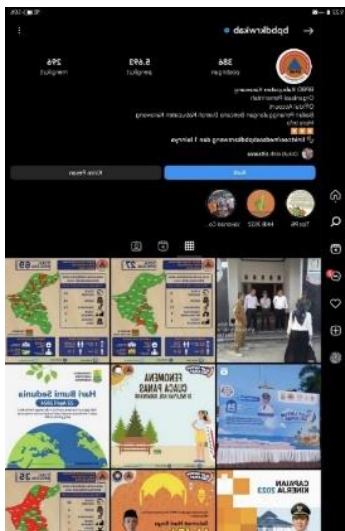
Acara minggon diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat sekitar Desa Cemarajaya.

Informasi yang sudah diciptakan oleh BPBD karawang khususnya hasil pengolahan data kejadian bencana diminta oleh polres, kepolisian, kominfo maupun badan pusat statistik karawang.

Sebaran informasi biasanya informasi yang sudah diciptakan ataupun yang sudah diterima dari BMKG mengenai perkiraan cuaca akan disebarkan oleh pegawai BPBD kedalam beberapa grup WhatsApp. Anggota dalam grup ini tidak hanya pegawai di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan saja melainkan selingkup jawa barat setiap perwakilan kabupaten sejava barat dengan bidang yang beraneka ragam. Hanya saja karena setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga bidang selain pencegahan dan kesiapsiagaan seperti bidang Darurat dan Logistik pun bisa masuk.

Penyebaran informasi seperti Instagram pun pegawai gunakan sebagai media menyebarkan informasi terkait peta riwayat kejadian bencana.

Instagram ini sebetulnya sudah tergabung di Instagram bulan april tahun 2018. Namun mulai aktif membuat konten terkait mitigasi bencana khususnya tentang peta riwayat kejadian bencana rutin perbualan saat tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari jumlah followers yang meningkat ketika tahun 2022 jumlah followers masih 2.000 dan meningkat pesat ditahun 2024 dengan jumlah 5.000 followers dan baru ter verifikasi bulan januari 2024.



Gambar 12. Akun Instagram BPBD Kab.Karawang  
Instagram BPBD Karawang  
@bpbdkarawangkab  
Untuk informasi pelaporan melalui telephone melalui hotline

WhatsApp belum berjalan. Dan karena website BPBD dikelola oleh Diskominfo, yang mana pegawai BPBD hanya dilihat informasi yang disebarakan lebih aktif menyebarkan informasi melalui Instagram dibandingkan website BPBD Karawang. Karena wewenang untuk mengelola website BPBD Karawang dikelola oleh Diskominfo, sehingga untuk menyebarkan informasi ke website pegawai perlu wewenang dari Diskominfo tidak bisa langsung diproses oleh BPBD Karawang karena BPBD Karawang hanya sebagai user saja.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan triangulator dalam penelitian ini yaitu Bapak Ida Bagus Gede Widnyana Putra yang menyebutkan bahwa dalam komunikasi dan diseminasi informasi sama dengan BPBD Karawang, menggunakan whatsapp sebagai sarana komunikasi tetapi berbeda dengan BPBD karawang yang belum memiliki humas yang membantu mengelola dan menghimpun semua informasi yang kita olah. Jadi setiap informasi dari bidang-bidang itu di posting disana. Di disampaikan di Whatsapp Grup itu. Nanti tim Humas



Pusdalog mengolah bahan dari bidang bidang untuk dijadikan konten berita.

Untuk media penyebaran informasi, BPBD Prov.Bali lebih lengkap dan cakupannya lebih luas mulai dari radio komunikasi yang sudah terhubung ke semua kabupaten kota, BPBD kabupaten kota, provinsi dan BNPB kemudian Youtube. Juga ada tiktok ada. Sementara media penyebaran informasi BPBD Karawang.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan dalam bagian hasil dan pembahasan, maka dalam bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan terkait seluruh hasil dan pembahasan yang telah disampaikan.

1. Dalam mencari Informasi pegawai BPBD karawang mengenai mitigasi bencana abrasi kec.cibuaya, pegawai BPBD Karawang sudah menggunakan berbagai sumber informasi yang kredibel untuk mitigasi bencana abrasi, seperti BMKG, BNPB, GIS, dan SATGAS. Sumber informasi tersebut dipilih

berdasarkan relevansi, kredibilitas, pemanfaatan, dan kemuktahiran. Meskipun BPBD Karawang telah menggunakan sumber informasi yang memadai, masih terdapat kekurangan dalam hal informasi potensi bencana di setiap daerah. Hal ini dapat diatasi dengan menyelesaikan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontingensi (RenKon). Namun, beberapa dokumen tersebut masih dalam proses review dari BNPB dan masih perlu direvisi sehingga belum bisa digunakan sebagai dokumen tambahan dalam mitigasi bencana abrasi.

2. Dalam mengevaluasi informasi pegawai BPBD karawang mengenai mitigasi bencana abrasi kec.cibuaya BPBD Karawang mengevaluasi informasi dan mengelola data bencana dengan menggunakan berbagai sumber, termasuk laporan dari masyarakat, BMKG, dan BNPB. Mereka memproses data ini dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana. Informasi yang disajikan meliputi pola sebaran kejadian

bencana, korban bencana, dan kerusakan yang ditimbulkan. Data bencana dipetakan untuk menunjukkan sebaran dampak bencana. BPBD Karawang menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan data bencana, seperti kurangnya data historis dan belum adanya sistem digitalisasi yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pelaporan data bencana ke DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia).

3. Dalam menciptakan informasi BPBD Karawang menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi bencana, termasuk grup WhatsApp dan Instagram. Instagram BPBD Karawang aktif membuat konten terkait mitigasi bencana, khususnya tentang peta riwayat kejadian bencana, dan mengalami peningkatan jumlah pengikut yang pesat. Namun, penyebaran informasi melalui website BPBD Karawang masih terhambat karena dikelola oleh Diskominfo dan BPBD Karawang hanya memiliki akses sebagai user. Selain itu, BPBD Karawang juga kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola informasi di bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan. BPBD Prov.Bali memiliki media penyebaran informasi yang lebih lengkap dan cakup, termasuk radio komunikasi, Youtube, dan TikTok. BPBD Karawang perlu meningkatkan akses dan sumber daya manusia untuk mengelola informasi di website dan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar penyebaran informasi bencana lebih efektif dan menyeluruh.

#### **Saran**

1. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan informasi dan kesiapsiagaan bencana di BPBD Karawang. Hal ini dapat dicapai dengan menyelesaikan dokumen-dokumen penting seperti Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontingensi (RenKon). Dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk:

- Memberikan gambaran jelas tentang risiko bencana di setiap wilayah.
- Membantu BPBD dalam menentukan fokus penanganan bencana dengan lebih terukur.

- Menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan pemerintahan.
- Menjadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Sebaiknya, perlu dilakukan pelatihan dan edukasi bagi pegawai BPBD dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk penyebaran informasi bencana dan koordinasi antar instansi terkait. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga penting untuk memastikan efektivitas program mitigasi bencana abrasi yang dijalankan.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Karawang sebaiknya meningkatkan pengelolaan data bencana untuk memberikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan membangun sistem digitalisasi terintegrasi, melakukan digitalisasi data historis, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan pelatihan bagi pegawai BPBD. Sistem digitalisasi terintegrasi akan memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan analisis data bencana.

Digitalisasi data historis juga penting untuk melengkapi informasi bencana yang ada. Koordinasi dengan instansi terkait dapat membantu BPBD untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terkini. Pelatihan bagi pegawai BPBD dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami dan menginterpretasikan data bencana.

3. BPBD Karawang sebaiknya meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi bencana kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan website dan media sosial yang lebih efektif, mengintegrasikan dan menganalisis informasi, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, dan memanfaatkan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ai Lien, D., Wydia Gunawan, Agustin Angelina Aruan, D., Kusuma, S., & Adriyanto, S. (2020). *Literasi Informasi: 7 Langkah Knowledge Management* (K. Sihotang, Ed.). Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI). (2024). Data Informasi Bencana Indonesia . Retrieved May 28, 2024, from Badan Nasional Penanggulangan Bencana website: <https://dibi.bnppb.go.id/>
- Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana.* (2020). Jakarta : Pusdatinkom BNPB. Retrieved from [https://perpustakaan.bnppb.go.id/bulian/index.php?p=show\\_detail&id=2005&keywords=Buku+Saku](https://perpustakaan.bnppb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=2005&keywords=Buku+Saku)
- Laporan Penerapan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang 2023.* (2024). Karawang.
- Mahmudin, M. (2016). *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Abrasi Menggunakan Citra Landsat Di Sempadan Pantai Cibuaya Kabupaten Karawang* (Universitas Pendidikan Indonesia). Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from <http://repository.upi.edu/27142/>
- Marlyono, S. G. (2017). Pengaruh Literasi Informasi Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Geografi Gea*, 16(2), 116. <https://doi.org/10.17509/gea.v16i2.4491>
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya* (Revisi-35, Vol. 103). Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Nursyabani, Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2020). Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 81–90. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.12>
- Olii Nazarina, & Sekky Rizky. (2020). Strategi Mitigasi Bencana Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kota Gorontalo. *Thesis (Thesis)*.

- Peraturan Pemerintah. *Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana.*, (2007). Jakarta: <https://web.bnppb.go.id/jdih/>.
- Perpustakaan BNPB. (2024). Retrieved May 21, 2024, from <https://perpustakaan.bnppb.go.id/bulian/>
- Pusat Meteorologi Maritim. (2024, May 22). Peringatan Gelombang Tinggi. Retrieved May 22, 2024, from [https://maritim.bmkg.go.id/peringatan/gelombang\\_tinggi](https://maritim.bmkg.go.id/peringatan/gelombang_tinggi)
- Pusdatinkom BNPB. *Peraturan BNPB No 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana.*, Pub. L. No. 7 (2024). Jakarta: <https://web.bnppb.go.id/jdih/>.
- UNESCO. (2023). Information Literacy. Retrieved January 23, 2023, from UNESCO website: <https://www.unesco.org/en/ifap/information-literacy>
- Visi Misi BPBD Kabupaten Karawang. (2024). Retrieved May 27, 2024, from BPBD Karawang website: <https://bpbd.karawangkab.go.id/selayang-pandang/visi-misi>
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metode* (1st–13th ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.